

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT JASA RAHARJA CABANG MAGELANG
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TENTANG
PENANGANAN DAN PENYELESAIAN SANTUNAN KORBAN KECELAKAAN
ALAT ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DAN LALU LINTAS JALAN**

Nomor : P / 35 / SP / 2026
Nomor : 445/ 046/ PKS/ IV/ 2026

Pada hari ini, Kamis tanggal Tiga puluh bulan April tahun Dua ribu dua puluh enam (30-04-2026), bertempat di Temanggung, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nifar Siahaan, S.E., selaku Kepala Cabang PT Jasa Raharja Cabang Magelang, berdasarkan Keputusan Direksi Nomor HC/41/III/2024 tanggal 03 September 2024 tentang Promosi dan Transfer Bagi Beberapa Orang Pegawai, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT Jasa Raharja Cabang Magelang, yang berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 125 Kota Magelang, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
- II. dr. Tetty Kurniawati, Sp.S., M.Kes, selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung berkedudukan di Jalan Gajah Mada No. 1A, Sendang, Walitelon Selatan, Kecamatan Temanggung, berdasarkan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 821.2/2907 Tahun 2021 tanggal 18 Agustus 2021 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, dalam kedudukannya tersebut diatas bertindak untuk dan atas nama serta oleh karenanya sah mewakili Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Temanggung, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA merupakan badan usaha yang diberi amanah oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan program jaminan perlindungan dasar kepada korban kecelakaan alat angkutan penumpang umum dan korban kecelakaan lalu lintas jalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan beserta peraturan pelaksanaannya;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum (PPK-BLU), berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada

masyarakat dimana salah satunya termasuk korban akibat kecelakaan alat angkutan penumpang umum dan lalu lintas jalan yang ditanggung oleh PIHAK PERTAMA;

- c. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya bagi korban kecelakaan alat angkutan penumpang umum dan lalu lintas jalan, maka PARA PIHAK sepakat untuk saling koordinasi dan kerja sama sesuai dengan kewenangannya masing-masing, dalam hal penanganan dan penyelesaian pembayaran santunan korban kecelakaan alat angkutan penumpang umum dan lalu lintas jalan secara terpadu guna menciptakan manfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1438 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Feri/Penyeberangan, Laut dan Udara;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.02/2018 tentang Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan Dalam Pemberian Manfaat Pelayanan Kesehatan;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pelayanan Kedokteran untuk Kepentingan Hukum;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
21. Peraturan Direksi PT Jasa Raharja Nomor PER/1/2024 tanggal 19 Desember 2024 tentang Diagnosis Cedera, Formularium, dan Kompendium Medis Nasional Jasa Raharja;
22. Peraturan Direksi PT Jasa Raharja Nomor PER/5/2025 tanggal 13 Februari 2025 tentang Medical Advisory Board PT Jasa Raharja;
23. *Memorandum of Understanding* antara PT Jasa Raharja dan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Nomor P/40/SP/2025 dan Nomor 011/MoU/PP.PERSI/IX/2025 tanggal 26 September 2025 tentang Kerjasama Peningkatan Pelayanan Kesehatan Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Lingkungan Rumah Sakit;

Dengan ini PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penanganan dan Penyelesaian Santunan Korban Kecelakaan Alat Angkutan Penumpang Umum dan Lalu Lintas Jalan, yang selanjutnya disebut dengan "Perjanjian Kerja Sama", dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Definisi

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan:

1. Aplikasi adalah sistem berbasis teknologi yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA dengan nama JRCare, yang berfungsi untuk pelayanan Perawatan dan Pengobatan Korban Kecelakaan Lalu Lintas bersifat *end-to-end* yang dapat diakses oleh PIHAK KEDUA.
2. Berkas Penagihan Lengkap adalah berkas tagihan biaya perawatan dan pengobatan Korban yang telah melalui proses verifikasi dalam Aplikasi.

3. Biaya Ambulans/Kendaraan Yang Membawa Korban adalah biaya pemakaian ambulans atau kendaraan lain yang digunakan untuk mengangkut Korban dari tempat kejadian Kecelakaan Lalu Lintas ke Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lainnya yang besar nilai manfaatnya sesuai ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA.
4. Biaya Ambulans/Kendaraan Yang Membawa Korban Berdasarkan Surat Rujukan adalah biaya penggunaan ambulans atau kendaraan lain yang digunakan untuk mengangkut Korban dari Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan ke rumah sakit lainnya atau fasilitas Kesehatan lainnya karena dibutuhkan penanganan dan perawatan Korban lebih lanjut, yang termasuk dalam manfaat Penggantian Biaya Perawatan dan Pengobatan.
5. Biaya Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan, yang selanjutnya disebut sebagai Biaya P3K adalah biaya Perawatan dan Pengobatan dari lokasi kejadian Kecelakaan Lalu Lintas sampai dengan perawatan di ruang gawat darurat yang besar nilai manfaatnya sesuai ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA.
6. Bukti Kejadian adalah suatu dokumen/data berisi informasi Kecelakaan Lalu Lintas dan diterbitkan oleh instansi yang berwenang menangani atas kejadian tersebut, berupa Laporan Polisi/data IRSMS atau dokumen resmi lainnya yang dikeluarkan oleh institusi Kepolisian/Syahbandar Laut/Bandar Udara/Kepala Stasiun Kereta Api atau instansi berwenang lainnya.
7. Data *Integrated Road Safety Management System*, yang selanjutnya disebut Data IRSMS adalah data Kecelakaan Lalu Lintas yang diproses melalui sistem aplikasi yang dimiliki oleh Korlantas Polri dan dapat diakses menggunakan jaringan internet.
8. Data Penanganan Korban Kecelakaan adalah data register Korban Kecelakaan Lalu Lintas yang ditangani oleh PIHAK KEDUA, baik Korban yang mengalami perawatan akibat luka-luka maupun yang meninggal dunia.
9. Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi.
10. Diagnosis Cedera adalah penentuan kondisi kesehatan yang sedang dialami oleh Korban Kecelakaan Lalu Lintas sebagai dasar pengambilan keputusan medis untuk prognosis dan pengobatan.
11. Diagnosis Cedera, Formularium, dan Kompendium Medis Nasional Jasa Raharja yang selanjutnya disebut DC-FKMN-JR adalah petunjuk teknis dalam optimalisasi biaya Perawatan dan Pengobatan di Rumah Sakit atau Fasilitas Kesehatan untuk penanganan Korban Kecelakaan Lalu Lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 beserta peraturan pelaksanaannya, yang digunakan dalam seluruh proses pengajuan klaim dan verifikasi.
12. Dokumen Medis Pendukung adalah dokumen dengan tujuan memberikan gambaran medis kondisi korban berupa rekam medis, hasil pemeriksaan laboratorium, hasil pemeriksaan radiologi, laporan tindakan operasi, foto luka

bermakna, surat kematian dan dokumen medis lainnya terkait dengan pelayanan kesehatan korban.

13. Formularium Obat adalah daftar obat terpilih yang dibutuhkan dan digunakan sebagai acuan penulisan resep pada pelaksanaan Pelayanan Kesehatan dalam penyelenggaraan Program Pertanggungjawaban Kecelakaan Lalu Lintas.
14. Hari Kalender adalah hari Senin sampai hari Minggu, termasuk hari libur nasional dan cuti bersama.
15. Hari Kerja adalah hari selain hari Sabtu, Minggu, hari libur nasional, dan cuti bersama sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah dan dimana bank buka untuk kegiatan usahanya sesuai ketentuan Bank Indonesia.
16. Kecelakaan Alat Angkutan Penumpang Umum dan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang selanjutnya disebut Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan umum yang datangnya tidak disangka-sangka dan tidak disengaja yang mengakibatkan Korban.
17. Kompendium Alat Kesehatan adalah daftar dan spesifikasi alat kesehatan dan bahan medis habis pakai terpilih dengan persyaratan standar minimal keamanan, mutu dan manfaat untuk digunakan di fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan Kecelakaan Lalu Lintas.
18. Korban adalah orang yang mengalami Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan meninggal dunia, luka-luka, dan cacat pada anggota tubuh yang bersangkutan, termasuk kondisi cedera yang mengancam hilangnya nyawa atau hilangnya anggota tubuh.
19. Korban Spesifik adalah Korban yang akibat kompleksitas cederanya diperlukan analisis Medikolegal dalam menentukan hubungan sebab akibat keterjaminan, kewajaran, atau tindak lanjut pembayaran Santunan terkait dengan Kecelakaan Lalu Lintas yang dialaminya.
20. Medikolegal adalah suatu ilmu kedokteran terapan utamanya diagnosis, terapi dan prognosis untuk kepentingan hukum yang memerlukan penilaian dan pendapat tenaga medis independen berwenang untuk menyelesaikannya.
21. Pelayanan Penunjang Medis adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang dilakukan untuk mendukung upaya diagnosis, terapi, prognosis pasien oleh tenaga medis, meliputi antara lain pemeriksaan laboratorium, radiodiagnostik, diagnostik elektromedis, pelayanan farmasi, pelayanan darah dan rehabilitasi medis sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.
22. Pelayanan Penunjang Non-Medis adalah kegiatan pelayanan pendukung yang diselenggarakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan guna menjamin mutu, kenyamanan, dan keselamatan pasien selama proses perawatan, yang meliputi antara lain pelayanan administrasi, logistik, sarana dan prasarana rumah sakit, layanan gizi, laundry, serta layanan umum lainnya.
23. Pelayanan Kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, dan ataupun masyarakat.

24. Perawatan dan Pengobatan adalah Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada Korban, untuk tindakan yang meliputi antara lain pertolongan pertama, Rawat Jalan, Rawat Gawat Darurat, Rawat Inap, *high care*, dan Rawat Intensif.
25. Rawat Gawat Darurat adalah Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada Korban yang membutuhkan pertolongan pertama atau pertolongan lanjutan dengan maksud menyelamatkan jiwa dan/atau mencegah kecacatan.
26. Rawat Jalan adalah semua pelayanan yang disediakan Rumah Sakit kepada Korban dalam upaya Perawatan dan Pengobatan atau pemulihan kesehatan dimana Korban tidak harus menginap di Rumah Sakit.
27. Rawat Inap adalah upaya Perawatan dan Pengobatan atau pemulihan kesehatan yang mengharuskan Korban untuk menginap di Rumah Sakit yang bersangkutan dalam jangka waktu tertentu.
28. Rawat Intensif adalah pelayanan medis yang diberikan kepada pasien dalam kondisi kritis atau berisiko tinggi yang memerlukan pengamatan terus-menerus, dukungan fungsi organ vital, intervensi medis kompleks, dan tim multidisipliner khusus, yang dilakukan di ruang khusus yang dilengkapi dengan sarana-prasarana, peralatan, dan SDM yang memenuhi standar keamanan, keselamatan pasien.
29. Rumah Sakit adalah institusi yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan Rawat Inap, Rawat Jalan, dan Rawat Darurat.
30. Santunan adalah sejumlah uang atau dana yang diberikan oleh pemerintah kepada Korban atau ahli warisnya melalui PIHAK PERTAMA berupa Penggantian Biaya Perawatan dan Pengobatan, Biaya Ambulans/Kendaraan Yang Membawa Korban ke Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lainnya, Biaya Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan, santunan meninggal dunia, dan/atau santunan cacat tetap, dengan nilai yang berlaku pada PIHAK PERTAMA.
31. Surat Jaminan adalah surat jaminan yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA atas Perawatan dan Pengobatan Korban oleh PIHAK KEDUA yang turut mencantumkan batas paling banyak Penggantian Biaya Perawatan dan Pengobatan, Biaya Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan dan/atau Biaya Ambulans/Kendaraan Yang Membawa Korban yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, setelah diterbitkannya Bukti Kejadian oleh instansi yang berwenang.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan untuk meningkatkan kerja sama PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan kecepatan, ketepatan penanganan, dan pendataan Korban yang mengalami Kecelakaan Lalu Lintas secara terpadu.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

- a. Memudahkan proses pendataan, Pelayanan Kesehatan, dan penyelesaian Santunan bagi Korban;
- b. Memberikan pelayanan kepada Korban untuk mendapatkan pertolongan, Perawatan dan Pengobatan, serta Santunan diterima oleh Korban sesuai ketentuan; dan
- c. Mempermudah koordinasi dan komunikasi PARA PIHAK, sehingga PIHAK PERTAMA dapat segera memberikan kepastian jaminan terhadap Korban akibat dari peristiwa Kecelakaan Lalu Lintas.

Pasal 3

Ruang Lingkup Pelayanan Kesehatan

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
 - a. Pertukaran informasi dan pemutakhiran data;
 - b. Peningkatan kualitas Pelayanan medis dan medikolegal korban;
 - c. Peningkatan kemudahan proses penyelesaian Santunan; dan
 - d. Sistem penjaminan dan pembiayaan Korban.
- (2) Pekerjaan Pelayanan Kesehatan bagi Korban dilaksanakan di tempat PIHAK KEDUA, yaitu di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung

BAB II

PROSEDUR PELAYANAN

Pasal 4

Surat Jaminan

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan Surat Jaminan kepada PIHAK KEDUA untuk memberikan Perawatan dan Pengobatan kepada Korban yang didasarkan pada Bukti Kejadian yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Surat Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya dalam waktu 2 X 24 jam (dua kali dua puluh empat jam) pada Hari Kerja.
- (3) Apabila Surat Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima PIHAK KEDUA dalam waktu yang ditetapkan, maka seluruh biaya Perawatan dan Pengobatan Korban langsung ditagihkan kepada Korban.

BAB III

MEKANISME PENGANTIAN BIAYA

Pasal 5

Biaya Perawatan dan Pengobatan

- (1) Biaya Perawatan dan Pengobatan Korban meliputi:
 - a. Penggantian Biaya Perawatan dan Pengobatan;
 - b. Biaya Pertolongan Pertama pada Kecelakaan;

- c. Biaya Ambulans atau Kendaraan Lain yang Membawa Korban; dan
 - d. Biaya Ambulans atau Kendaraan Lain yang Membawa Korban Berdasarkan Surat Rujukan.
- (2) Penggantian Biaya Perawatan dan Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin oleh PIHAK PERTAMA, meliputi:
- a. Pelayanan medis dan keperawatan, termasuk pemeriksaan dan tindakan oleh dokter dan/atau tenaga kesehatan lainnya, baik operatif maupun nonoperatif, intervensional, dan asuhan keperawatan selama masa perawatan sesuai petunjuk dokter yang bertanggung jawab;
 - b. Pelayanan Penunjang Medis dan Pelayanan Penunjang Non-Medis;
 - c. Jenis Pelayanan Kesehatan, meliputi pelayanan Rawat Gawat Darurat, Rawat Inap, dan Rawat Jalan; dan
 - d. Penggunaan obat dan alat kesehatan, berpedoman pada DC-FKMN-JR dan/atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
- (3) Jaminan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA bersifat terbatas pada pembiayaan Perawatan dan Pengobatan dalam rangka penyelamatan nyawa, pencegahan kecacatan, serta stabilisasi kondisi Korban sebagai akibat langsung dari Kecelakaan Lalu Lintas.
- (4) Jaminan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA tidak mencakup:
- a. Biaya pengobatan atas penyakit kronis, penyakit bawaan, atau penyakit penyerta (*komorbid*) yang secara klinis tidak memiliki hubungan kausalitas langsung dengan cedera akibat Kecelakaan Lalu Lintas;
 - b. Pelayanan pemulasaraan jenazah; dan
 - c. Pembelian anggota atau organ badan buatan seperti kaki/tangan palsu, gigi/mata palsu, dan sejenisnya.
- (5) Biaya Ambulans/Kendaraan yang Membawa Korban Berdasarkan Surat Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali.
- (6) Biaya Perawatan dan Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sampai batas paling banyak sebagaimana tercantum dalam Surat Jaminan yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA.
- (7) Dalam hal penggantian biaya perawatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup biaya administrasi, maka pembayarannya ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. sebesar 1% (satu perseratus) dari nominal kuitansi yang ditagihkan atau sesuai jumlah lain yang disepakati PARA PIHAK;
 - b. paling banyak sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap berkas pengajuan santunan; dan
 - c. telah diperhitungkan dalam komponen Biaya Perawatan dan Pengobatan.
- (8) PIHAK KEDUA dapat memberikan potongan biaya kepada Korban atas Penggantian Biaya Perawatan dan Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang ketentuan dan besaran potongannya diatur serta dituangkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

- (9) Selisih potongan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat digunakan oleh PIHAK KEDUA untuk optimalisasi pelayanan perawatan dan pengobatan dalam rangka mendukung proses kesembuhan Korban.
- (10) Apabila biaya Perawatan dan Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi batas paling banyak sebagaimana tercantum pada ayat (6), maka selisih biaya menjadi tanggungan Korban.
- (11) Dalam hal Korban memiliki jaminan asuransi kesehatan lain, maka selama PIHAK PERTAMA belum menerbitkan Surat Jaminan, biaya perawatan dan pengobatan ditanggung terlebih dahulu oleh jaminan asuransi milik Korban.

Pasal 6

Penagihan Pembayaran

- (1) PIHAK KEDUA melakukan penagihan atas biaya Perawatan dan Pengobatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) kepada PIHAK PERTAMA harus dilengkapi dengan dokumen penagihan berupa:
 - a. Surat permintaan pembayaran dengan mencantumkan rekening penagihan dan dialamatkan kepada:
 - Nama : BEND PENERIMAAN BLUD RSUD TMG
 - Bank : Bank Jateng
 - No. Rek : 1014003122
 - b. 1 (satu) lembar kuitansi asli bermaterai cukup berikut lampiran perincian biaya, tindakan, bahan/alat kesehatan, obat-obatan, dan sebagainya secara lengkap;
 - c. Rekapitulasi/surat penagihan dari PIHAK KEDUA;
 - d. Dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan PIHAK PERTAMA, yaitu kartu identitas/Kartu Tanda Penduduk (KTP) Korban, Kartu Keluarga (KK), anak yang dibawah umur dilengkapi dengan Akta Kelahiran, Surat Keterangan Kesehatan Korban Akibat Kecelakaan atau Resume Medis yang berisi keterangan kesehatan Korban, dan Dokumen Medis Pendukung yang dibutuhkan;
 - e. Surat pernyataan dan pemberian kuasa dari Korban kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan pengurusan kepada PIHAK PERTAMA; dan
 - f. Formulir penerimaan pasien dari ambulans jika akan menagihkan Biaya Ambulans / Kendaraan Lain Yang Membawa Korban untuk pengantaran pasien dari tempat kejadian Kecelakaan Lalu Lintas ke Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lainnya.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan Surat Jaminan yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA.
- (3) Setiap perubahan rekening penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan pemberitahuan secara tertulis oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
- (4) Pembayaran atas tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui pemindahbukuan pada

rekening PIHAK KEDUA dan biaya yang timbul dari transaksi ini atau pihak bank menjadi tanggungan PIHAK PERTAMA.

- (5) PIHAK PERTAMA wajib membayar tagihan biaya Perawatan dan Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja setelah PIHAK PERTAMA menerima berkas penagihan lengkap dari PIHAK KEDUA.
- (6) PIHAK PERTAMA dapat melakukan klarifikasi terhadap Perawatan dan Pengobatan Korban yang dijamin kepada PIHAK KEDUA.
- (7) Apabila PIHAK PERTAMA belum melunasi tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja sejak PIHAK PERTAMA menerima tagihan secara lengkap dari PIHAK KEDUA dan tidak terdapat permintaan klarifikasi terhadap Perawatan dan Pengobatan Korban, maka PIHAK KEDUA membuat surat tagihan tertulis yang kedua kepada PIHAK PERTAMA.
- (8) Apabila PIHAK PERTAMA belum menyelesaikan kewajibannya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja sejak surat tagihan tertulis yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diterima, maka PIHAK KEDUA berhak memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini dengan tidak mengurangi kewajiban masing-masing PIHAK untuk menyelesaikannya.

Pasal 7

Penolakan dan Penundaan Pembayaran

- (1) PIHAK PERTAMA dapat menunda pembayaran yang ditagihkan oleh PIHAK KEDUA dalam hal terdapat bukti-bukti Perawatan dan Pengobatan yang membutuhkan klarifikasi lebih lanjut dari PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK PERTAMA dapat menolak pembayaran tagihan biaya Perawatan dan Pengobatan Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yang tidak sesuai dengan kewenangan atau ruang lingkup jaminan dari PIHAK PERTAMA, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA.

BAB IV

APLIKASI

Pasal 8

Penggunaan Aplikasi

- (1) PIHAK PERTAMA menyediakan Aplikasi yang dapat dipergunakan selama jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini secara langsung oleh PIHAK KEDUA, dengan layanan sebagai berikut:
 - a. layanan penjaminan;
 - b. layanan penagihan biaya Perawatan dan Pengobatan;
 - c. layanan verifikasi biaya Perawatan dan Pengobatan; dan

- d. layanan pembelian obat-obatan dan alat kesehatan.
- (2) *User* dan *Password* untuk penggunaan Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
 - (3) PIHAK KEDUA wajib menjaga kerahasiaan *user* dan *password* yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA dan apabila terjadi penyalahgunaan *user* dan *password* tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
 - (4) Pemanfaatan Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh PIHAK KEDUA merujuk pada *user manual* yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA yang dapat diakses pada Aplikasi.

Pasal 9 **Layanan Penjaminan**

- (1) Layanan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b digunakan sebagai dasar penjaminan Pelayanan Kesehatan bagi Korban yang dirawat di PIHAK KEDUA.
- (2) Surat Jaminan berlaku bagi Korban dari sejak mulai menjalani Perawatan dan Pengobatan di PIHAK KEDUA sampai dengan Korban selesai menjalani Perawatan dan Pengobatan sesuai dengan standar pelayanan, standar prosedur operasional, panduan praktik klinis yang mengacu pada pedoman nasional pelayanan kedokteran, etika dan pedoman perilaku rumah sakit, serta Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (KODERSI) serta ketentuan administratif penjaminan yang diberlakukan oleh PIHAK PERTAMA.
- (3) PIHAK KEDUA dapat mengakses Surat Jaminan pada Aplikasi dan memonitor status penyelesaian verifikasi biaya Perawatan dan Pengobatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1).
- (4) Terhadap Korban yang memerlukan kontrol lanjutan pasca Rawat Inap, PIHAK PERTAMA dapat menerbitkan Surat Jaminan lanjutan berdasarkan sisa plafon jaminan yang tercatat pada Aplikasi setelah PIHAK KEDUA mengajukan penagihan atas Surat Jaminan sebelumnya.

Pasal 10 **Layanan Penagihan Biaya Perawatan dan Pengobatan**

- (1) Layanan penagihan biaya Perawatan dan Pengobatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c digunakan oleh PIHAK KEDUA untuk melakukan penagihan atas Biaya Perawatan dan Pengobatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Apabila terdapat Korban yang atas rekomendasi dokter PIHAK KEDUA diharuskan untuk menjalani beberapa kali Rawat Jalan, maka PIHAK KEDUA dapat menagihkan biaya Perawatan dan Pengobatan atas Rawat Jalan dalam satu kali penagihan.

Pasal 11
Layanan Verifikasi Biaya Perawatan dan Pengobatan

- (1) Layanan verifikasi Biaya Perawatan dan Pengobatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d digunakan untuk melakukan pemeriksaan validitas, keabsahan dan kewajaran nilai penagihan Biaya Perawatan dan Pengobatan PIHAK KEDUA.
- (2) Layanan verifikasi Biaya Perawatan dan Pengobatan dilakukan setelah PIHAK KEDUA mengisi Surat Pernyataan dan Pemberian Kuasa, Form Keterangan Kesehatan Korban Akibat Kecelakaan dan lampiran resume medis dan dokumen/bukti medikolegal pada Aplikasi.
- (3) Apabila berkas klaim telah selesai diverifikasi, namun belum disepakati atas hasil verifikasi tersebut, maka PIHAK KEDUA dapat mengajukan permintaan verifikasi ulang.
- (4) Apabila terdapat kendala dalam hal verifikasi dan penagihan melalui Aplikasi, PIHAK KEDUA dapat mengajukan pertanyaan melalui layanan *helpdesk* Aplikasi.

Pasal 12
Layanan Pembelian Obat-Obatan dan Alat Kesehatan

- (1) Layanan pembelian obat-obatan dan alat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a didasarkan pada skema *business to business* antara PIHAK KEDUA dan pihak penyedia barang/*principal* obat-obatan dan alat kesehatan tanpa ada unsur paksaan dari PIHAK PERTAMA.
- (2) PIHAK KEDUA dapat melakukan pembelian obat-obatan dan alat kesehatan pada Aplikasi untuk memenuhi kebutuhan obat-obatan dan alat kesehatan dalam rangka Perawatan dan Pengobatan Korban.
- (3) Pemanfaatan layanan pembelian obat-obatan dan alat kesehatan sepenuhnya menjadi kewenangan PIHAK KEDUA berdasarkan ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA, serta tidak menjadi syarat terpenuhinya standarisasi Formularium Obat dan Kompendium Alat Kesehatan sebagaimana ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA.
- (4) PIHAK PERTAMA sebagai penyedia Aplikasi tidak menerima manfaat atau keuntungan dalam bentuk apapun pada setiap transaksi pembelian obat-obatan dan alat kesehatan yang dilakukan PIHAK KEDUA melalui Aplikasi.

BAB V
PEJABAT YANG DITUNJUK

Pasal 13

- (1) Surat pemberitahuan, surat penagihan, laporan, surat-menyurat atau komunikasi lainnya dari dan untuk PARA PIHAK ditujukan ke masing-masing alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK PERTAMA**

Nama : Nifar Siahaan, S.E.

Jabatan : Kepala Cabang

Telepon : 0293-362864

b. **PIHAK KEDUA**

1. Untuk Perjanjian Kerja Sama

Nama : dr. Cahyadi Tri Stiyanto

Jabatan : Kabid Penunjang Medis dan Non Medis

Telepon : 08122941127

2. Untuk Penagihan

Nama : Cyntia Itsna

Jabatan : Staff Pembayaran Rawat Jalan

Telepon : 08112935850

- (2) Penggantian Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilaksanakan atas pemberitahuan dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya untuk kemudian dituangkan secara tertulis dalam bentuk surat pemberitahuan.
- (3) Penandatanganan yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yang dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hierarki dan apabila dengan penandatanganan tersebut mengakibatkan kerugian bagi masing-masing PIHAK maka hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK tersebut.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 14 Kewajiban Para Pihak

- (1) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:
- Menyediakan formulir pengajuan Santunan;
 - Menyampaikan Surat Jaminan kepada PIHAK KEDUA setelah diperoleh kesimpulan atas status keterjaminan Korban berdasarkan Bukti Kejadian dari instansi yang berwenang;
 - Menentukan keterjaminan Korban yang didasarkan pada Bukti Kejadian, bukti medikolegal, dan ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA;
 - Melaksanakan penyelesaian pembayaran Santunan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja sejak Berkas Penagihan Lengkap dan tidak terdapat permintaan klarifikasi terhadap Perawatan dan Pengobatan Korban;
 - Membayar kepada PIHAK KEDUA tagihan biaya Perawatan dan Pengobatan sesuai hasil verifikasi dengan nilai sampai dengan batasan paling banyak sesuai yang tercantum dalam Surat Jaminan yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA;

- f. Dalam hal PIHAK KEDUA menerima rujukan Korban dari Rumah Sakit yang terikat dengan perjanjian yang sama dengan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK PERTAMA berkewajiban menginformasikan kepada PIHAK KEDUA mengenai jumlah tagihan yang telah dibayar kepada Rumah Sakit yang merujuk;
- g. Menyediakan Aplikasi untuk digunakan oleh PIHAK KEDUA sebagai sarana/instrumen digital dalam penjaminan Korban, Perawatan dan Pengobatan, hingga penagihan dan verifikasi biaya Perawatan dan Pengobatan Korban;
- h. Melakukan sosialisasi penggunaan Aplikasi sebagaimana dimaksud pada huruf g kepada PIHAK KEDUA;
- i. Menyampaikan standarisasi DC-FKMN-JR yang telah disusun sebagai rujukan/pedoman PIHAK KEDUA dalam melakukan Perawatan dan Pengobatan Korban yang telah diterbitkan Surat Jaminan oleh PIHAK PERTAMA; dan
- j. Melakukan sosialisasi implementasi standarisasi DC-FKMN-JR sebagaimana pada huruf i kepada PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

- a. Melakukan penanganan terhadap Korban yang mengalami Kecelakaan Lalu Lintas sesuai standar pelayanan, standar prosedur operasional, panduan praktik klinis yang mengacu pedoman nasional pelayanan kedokteran, etika dan pedoman perilaku rumah sakit yang mengacu Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (KODERSI) dengan memperhatikan kompetensi rumah sakit sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Memberikan kuitansi asli biaya Perawatan dan Pengobatan Korban dengan melampirkan perincian biaya, tindakan, bahan/alat kesehatan, obat-obatan, dan sebagainya secara lengkap serta persyaratan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) kepada PIHAK PERTAMA;
- c. Menginformasikan kepada PIHAK PERTAMA tentang adanya Korban Kecelakaan Lalu Lintas yang diantarkan langsung oleh masyarakat ke Unit Gawat Darurat (UGD) untuk proses percepatan pembuatan Bukti Kejadian dan Surat Jaminan;
- d. Melakukan pertukaran informasi dan pemutakhiran data secara *real time* dengan PIHAK PERTAMA;
- e. Menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA mengenai informasi Korban yang akan keluar dari Rumah Sakit PIHAK KEDUA;
- f. Menyampaikan kepada Korban mengenai total biaya pengajuan pembayaran Santunan yang timbul akibat dari Perawatan dan Pengobatan Korban dengan penjelasan biaya yang ditanggung oleh PIHAK PERTAMA;
- g. Biaya pengajuan pembayaran Santunan sebagaimana dimaksud pada huruf f dicantumkan dalam surat pernyataan dan pemberian kuasa serta ditandatangani oleh Korban atau keluarganya dan PARA PIHAK;
- h. Menyampaikan tagihan biaya Perawatan dan Pengobatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja sejak Korban selesai menjalani Perawatan dan Pengobatan pada PIHAK KEDUA;

- i. Menanggapi saran dan keluhan yang disampaikan PIHAK PERTAMA maupun Korban sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sejak saran dan keluhan diterima PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA;
- j. Menggunakan Aplikasi yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA sebagai sarana/instrumen digital dalam Perawatan dan Pengobatan hingga penagihan biaya Perawatan dan Pengobatan Korban kepada PIHAK PERTAMA;
- k. Menggunakan standarisasi DC-FKMN-JR yang berlaku berdasarkan ketentuan PIHAK PERTAMA sebagai rujukan PIHAK KEDUA dalam melakukan Perawatan dan Pengobatan Korban; dan
- l. Memberikan Dokumen Medis Pendukung dan/atau keterangan klinis dari dokter penanggung jawab pelayanan atau tenaga kesehatan PIHAK KEDUA yang relevan dan diperlukan oleh PIHAK PERTAMA dalam rangka melakukan analisis medikolegal, verifikasi keabsahan biaya Perawatan dan Pengobatan, dan penyelesaian pengajuan santunan bagi Korban, dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Hak Para Pihak

- (1) PIHAK PERTAMA berhak untuk:
- a. Memperoleh data penanganan Korban oleh PIHAK KEDUA dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan penyelesaian Santunan Korban;
 - b. Memonitor jumlah biaya Perawatan dan Pengobatan Korban yang akan ditagihkan selambat-lambatnya setiap 3 (tiga) Hari Kalender sekali;
 - c. Menetapkan bahwa Korban berada di dalam lingkup jaminan didasarkan pada Bukti Kejadian dan peraturan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA;
 - d. Apabila diperlukan, PIHAK PERTAMA dapat meminta penjelasan secara tertulis dari PIHAK KEDUA tentang status cedera Korban;
 - e. Melakukan verifikasi atas kebenaran kasus Kecelakaan Lalu Lintas (terjamin atau tidak), identitas Korban, maupun ahli waris Korban serta kewajaran dan kesesuaian biaya Perawatan dan Pengobatan yang ditagihkan oleh PIHAK KEDUA dengan ketentuan internal PIHAK PERTAMA;
 - f. Meminta dokumen yang menjadi persyaratan administrasi dalam pembayaran biaya Perawatan dan Pengobatan yang ditagihkan oleh PIHAK KEDUA;
 - g. Melakukan penolakan ataupun penundaan atas tagihan dari PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 jika tidak sesuai dengan ketentuan pembayaran;
 - h. Memperoleh Dokumen Medis Pendukung dan/atau keterangan klinis dari dokter penanggung jawab pelayanan atau tenaga kesehatan PIHAK KEDUA yang relevan dan diperlukan oleh PIHAK PERTAMA dalam rangka melakukan analisis medikolegal, verifikasi keabsahan biaya Perawatan dan

Pengobatan, dan penyelesaian pengajuan santunan bagi Korban, dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- i. Menyampaikan keluhan dan saran kepada PIHAK KEDUA apabila terjadi pelaksanaan yang tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini; dan
- j. Meminta daftar/ketentuan tentang tarif layanan kepada PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KEDUA berhak untuk:

- a. Memperoleh kepastian dan besar nilai jaminan terhadap Korban yang menjalani Perawatan dan Pengobatan pada PIHAK KEDUA berdasarkan Bukti Kejadian dari instansi yang berwenang;
- b. Mengajukan tagihan biaya Perawatan dan Pengobatan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja setelah Korban selesai menjalani Perawatan dan Pengobatan pada PIHAK KEDUA;
- c. Mendapatkan pembayaran biaya Perawatan dan Pengobatan yang diajukan kepada PIHAK PERTAMA yang telah memenuhi persyaratan administrasi yang dibutuhkan PIHAK PERTAMA;
- d. Menyampaikan keluhan dan saran kepada PIHAK PERTAMA apabila terjadi pelaksanaan yang tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini;
- e. Meminta sosialisasi dari PIHAK PERTAMA mengenai penggunaan Aplikasi, lingkup dan persyaratan penjaminan bagi Korban yang dirawat pada PIHAK KEDUA, dan standarisasi DC-FKMN-JR yang berlaku berdasarkan ketentuan PIHAK PERTAMA; dan
- f. Menyampaikan usulan pemutakhiran DC-FKMN-JR kepada PIHAK PERTAMA sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan mutu dan keselamatan korban sesuai standar nasional pelayanan, disiplin, etika kerumahsakitank sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VII **FORCE MAJEURE**

Pasal 16 **Keadaan Force Majeure**

- (1) Masing-masing PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing PIHAK yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* adalah termasuk namun tidak terbatas pada adanya bencana alam seperti gempa bumi, topan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada PIHAK

lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *Force Majeure*.

- (4) *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini. Setelah *Force Majeure* berakhir dan kondisinya masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan, maka PARA PIHAK akan melanjutkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VIII

DOMISILI HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 17

Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diantara PARA PIHAK terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, maka PARA PIHAK sepakat akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan segala permasalahan yang timbul dan tiap-tiap perselisihan serta perbedaan pendapat tersebut melalui Pengadilan Negeri Temanggung.

BAB IX

JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Pasal 18

Jangka Waktu Perjanjian Kerja Sama

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal 30 April 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2029, dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang menghendaki perpanjangan Perjanjian Kerja Sama wajib menyampaikan kepada PIHAK lainnya dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama berakhir.

Pasal 19

Penundaan, Pembatalan, dan Pengakhiran Perjanjian

- (1) Masing-masing PIHAK dapat setiap saat melakukan penundaan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini apabila terdapat indikasi adanya penyimpangan dan/atau kecurangan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini oleh salah satu PIHAK yang menyebabkan kerugian bagi PIHAK lainnya.

- (2) Masing-masing PIHAK dapat setiap saat melakukan pengakhiran/pemutusan Perjanjian Kerja Sama dengan membuat pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran/pemutusan Perjanjian Kerja Sama yang dikehendaki, apabila terpenuhi keadaan salah satu atau beberapa hal tersebut di bawah ini:
- Salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama apabila setelah ditinjau kembali/dievaluasi tidak berkenan melanjutkan kerja sama;
 - Salah satu PIHAK melanggar ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan PIHAK lainnya telah memberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja namun PIHAK yang melanggar tidak menunjukkan itikad baik untuk melakukan upaya perbaikan;
 - Adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, keputusan instansi yang berwenang, dan/atau peraturan perundang-undangan yang mengharuskan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama;
 - Salah satu PIHAK berada dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang final dan mengikat atau hal-hal lain yang menyebabkan salah satu PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, yang dibuktikan dengan surat dari instansi/pihak yang berwenang; dan/atau
 - Terjadi *Force Majeure* yang berlangsung lebih dari 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (3) Apabila sampai dengan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak surat pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada tanggapan, maka PIHAK yang menerima pemberitahuan tersebut dianggap telah menyetujui pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang belum diselesaikan akibat adanya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Untuk mengakhiri/membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat dan setuju bahwa hal tersebut tidak perlu melalui perantaraan hakim. Oleh karena itu, PARA PIHAK dengan ini secara tegas mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- (6) Dalam hal PARA PIHAK bermaksud menjalin kembali kerja sama setelah dilakukan pengakhiran atau pemutusan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka:
- kerja sama hanya dapat dilanjutkan setelah dilakukan evaluasi dan perbaikan atas penyebab pengakhiran sebelumnya;
 - hasil evaluasi dituangkan dalam berita acara atau dokumen hasil penilaian kinerja yang disepakati PARA PIHAK; dan
 - pembaruan kerja sama dilakukan melalui penandatanganan perjanjian kerja sama baru dengan ketentuan dan persyaratan yang telah disesuaikan berdasarkan hasil perbaikan dimaksud.

BAB X

KERAHASIAAN DAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI

Pasal 20

Kerahasiaan

- (1) PARA PIHAK dengan ini menyatakan selama berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini, tidak akan membuka, mengungkapkan, mengiklankan, mengumumkan, menyiarkan dan/atau menyebarluaskan semua data termasuk tetapi tidak terbatas pada informasi, keterangan dan dokumen-dokumen penting lainnya yang diterima PARA PIHAK selama pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (selanjutnya disebut "Informasi Rahasia") yang diperoleh dari masing-masing PIHAK kepada pihak manapun, kecuali:
 - a. Data tersebut merupakan informasi milik umum, karena sudah dibuka untuk umum oleh pemilik informasi;
 - b. Harus diberikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan wajib segera diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya; dan/atau
 - c. Berdasarkan penetapan pengadilan atau abritase.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk tidak memanfaatkan semua data yang diperoleh dari masing-masing PIHAK dalam bentuk apapun dan untuk keperluan apapun kecuali yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Masing-masing PIHAK dan/atau karyawan, maupun pihak lain yang ditunjuk oleh masing-masing PIHAK tidak akan melakukan penggandaan dan/atau menyebarluaskan Informasi Rahasia kepada pihak manapun juga dan dengan cara apapun juga, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PARA PIHAK.
- (4) Masing-masing PIHAK dan/atau karyawan maupun pihak lain yang ditunjuk oleh masing-masing PIHAK wajib mematuhi ketentuan kerahasiaan dalam Pasal ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan data pribadi.
- (5) Ketentuan dalam Pasal ini akan tetap berlaku walaupun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 21

Pelindungan Data Pribadi

- (1) Selama salah satu PIHAK bertindak sebagai pihak yang menerima Data Pribadi (selanjutnya disebut Penerima Data) untuk memproses Data Pribadi sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, maka Penerima Data tersebut wajib:
 - a. menjaga dan memelihara Data Pribadi dengan kerahasiaan yang ketat, menggunakan tingkat kerahasiaan yang layak untuk mencegah adanya akses, penggunaan, pemrosesan, transfer maupun pengungkapan yang tidak diizinkan;
 - b. memproses Data Pribadi hanya dan secara eksklusif untuk tujuan pelaksanaan dari Perjanjian Kerja Sama ini;

- c. tidak akan, baik secara langsung maupun tidak langsung, menggunakan, memproses, menjual, memindahkan, mendistribusikan, atau dengan cara lain mengungkapkan atau menyediakan Data Pribadi untuk kepentingannya atau untuk manfaat pihak lain selain PIHAK yang memberikan Data Pribadi (selanjutnya disebut Pemberi Data);
- d. hanya akan memberikan akses kepada personil yang membutuhkan akses ke Data Pribadi dan harus memastikan bahwa personil yang memiliki akses ke atau memproses Data Pribadi tersebut memiliki kewajiban hukum untuk menjaga kerahasiaan Data Pribadi;
- e. tidak akan memindahkan Data Pribadi ke negara lain atau pihak lain tanpa persetujuan tertulis secara tegas dari Pemberi Data. Jika disetujui oleh Pemberi Data, setiap transfer Data Pribadi oleh Penerima Data tersebut ke negara lain harus mematuhi peraturan yang berlaku berdasarkan peraturan perlindungan Data Pribadi di Indonesia yang mengatur mengenai transfer Data Pribadi ke negara lain;
- f. akan menghancurkan, menghapus, atau membuat Data Pribadi yang ada dalam penguasaannya tidak dapat diakses dari catatannya pada saat menyadari adanya pelanggaran keamanan atau kapanpun berdasarkan permintaan Pemberi Data, yang mana yang terjadi terlebih dahulu;
- g. Apabila sebelum dilakukannya penghancuran, penghapusan, atau penghilangan dengan cara lain atau kapanpun Penerima Data menyadari adanya potensi atau kejadian pelanggaran keamanan terhadap Data Pribadi, Penerima Data menyetujui untuk memberitahukan kepada Pemberi Data sesegera mungkin secara tertulis, dalam setiap kondisi tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam setelah Penerima Data menyadari adanya potensi atau kejadian pelanggaran tersebut. Pemberitahuan tertulis yang dimaksud harus mencakup: (i) deskripsi mengenai jenis pelanggaran keamanan, termasuk volume dan jenis Data Pribadi yang terpengaruh dan kategori serta perkiraan jumlah individu yang terkait; (ii) kemungkinan konsekuensi atas pelanggaran keamanan; dan (iii) deskripsi mengenai langkah-langkah yang diambil atau diusulkan untuk diambil untuk mengatasi pelanggaran keamanan termasuk, jika sesuai, langkah-langkah untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul dari pelanggaran tersebut;
- h. Segera setelah pemberitahuan tertulis mengenai pelanggaran keamanan sebagaimana dimaksud pada huruf g di atas, PARA PIHAK akan berkoordinasi satu sama lain untuk melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran keamanan tersebut dan Penerima Data menyetujui untuk segera mengatasi setiap pelanggaran keamanan dan mencegah adanya pelanggaran keamanan lebih lanjut dengan biaya yang ditanggung oleh Penerima Data sesuai dengan hak-hak, hukum yang berlaku, dan standar privasi yang berlaku;
- i. Apabila kegagalan Pelindungan Data Pribadi tersebut memerlukan pelaporan kepada Subjek Data Pribadi dan/atau Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi, Penerima Data wajib segera berkoordinasi dengan Pemberi Data untuk memastikan:
 - 1. laporan disampaikan kepada Subjek Data Pribadi dan/atau Lembaga Pengawas paling lambat 3x24 jam sejak diketahui;

2. PARA PIHAK berkoordinasi untuk melakukan penyelidikan dan segera mengatasi setiap Kegagalan Pelindungan Data Pribadi; dan
 - j. Apabila suatu pelanggaran keamanan atas Data Pribadi disebabkan oleh pelanggaran atau kelalaian Penerima Data atas Perjanjian Kerja Sama ini, Penerima Data akan mengganti rugi dan membebaskan Pemberi Data terhadap setiap biaya, klaim, permintaan, pengeluaran dan kerugian dalam bentuk apapun yang timbul sehubungan dengan pelanggaran tersebut.
- (2) Pelindungan Penerima Data untuk menjaga Data Pribadi harus mencakup:
- a. membatasi akses personel terhadap Data Pribadi;
 - b. mengamankan fasilitas bisnis, pusat data, dokumen tertulis, jaringan komputer, sistem cadangan dan perlengkapan komputer, termasuk namun tidak terbatas pada semua perangkat bergerak dan perangkat lain yang memiliki kemampuan menyimpan informasi;
 - c. menerapkan keamanan pada jaringan, perangkat, aplikasi, pusat data, dan *platform*, termasuk penggunaan artificial intelligence.
 - d. melakukan enkripsi atas Data Pribadi yang disimpan di perangkat bergerak atau ditransmisikan melalui jaringan publik atau nirkabel;
 - e. memisahkan secara jelas Data Pribadi dari informasi milik Penerima Data atau pelanggannya sehingga Data Pribadi tersebut tidak tercampur dengan jenis informasi lainnya; dan
 - f. menerapkan prosedur dan praktek yang diperlukan untuk keamanan dan integritas personil, termasuk melakukan pemeriksaan latar belakang sesuai dengan hukum yang berlaku.
- (3) Dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi, PARA PIHAK wajib:
- a. Melakukan perekaman terhadap seluruh kegiatan pemrosesan Data Pribadi; dan
 - b. Melakukan penilaian dampak Pelindungan Data Pribadi.

BAB XI KETENTUAN LAIN

Pasal 22 *Addendum*

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau diperlukan perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK.
- (2) Segala perubahan berupa penambahan dan/atau pengurangan terhadap isi Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam bentuk *Addendum* yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 23
Pemberitahuan dan Korespondensi

- (1) Semua pemberitahuan dan komunikasi lain berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dengan diserahkan langsung, surat pos tercatat atau jasa kurir, email, atau melalui media lainnya dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing PIHAK sebagai berikut:
 - a. PT Jasa Raharja Cabang Magelang
Jalan Pahlawan Nomor 125 Kota Magelang
Telepon 0293-362864
Email : magelang@jasaraharja.co.id
 - b. RSUD Kabupaten Temanggung
Jln. Gajah Mada No. 1A, Sendang, Walitelon Selatan, Kec. Temanggung,
Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah Kode Pos 56219
Telepon 0293 491118 Faksimili 0293 493423
Email rsud_temanggung@yahoo.co.id / humas.rsudtmg@gmail.com
- (2) Setiap perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilaksanakan dengan pemberitahuan secara tertulis dari PIHAK yang menghendaki pergantian kepada PIHAK lainnya.

Pasal 24
Anti Penyuapan, Korupsi, dan APU-PPT

- (1) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, masing-masing PIHAK tidak menawarkan, menjanjikan, menyetujui atau mengesahkan setiap pembayaran atau pemberian, baik secara langsung maupun tidak langsung, barang atau materi yang mempunyai nilai (termasuk, namun tidak terbatas kepada hadiah, hiburan, makanan, diskon atau kredit pribadi, atau manfaat lainnya yang tidak dibayarkan pada nilai pasar) yang mempunyai tujuan atau efek penyuapan publik atau komersial; dan masing-masing PIHAK tidak akan mengambil tindakan yang akan membuat PARA PIHAK melanggar setiap ketentuan dalam peraturan dan hukum anti-penyuapan dan korupsi yang berlaku di Indonesia atau peraturan dan hukum yang melarang setiap tindakan yang melanggar hukum untuk tujuan mendapatkan manfaat komersil bisnis.
- (2) PARA PIHAK wajib tunduk kepada seluruh hukum dan peraturan tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) yang berlaku selama pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dan setuju untuk menyediakan informasi yang diperlukan untuk verifikasi kepatuhan atas peraturan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme yang berlaku yang secara wajar diminta oleh PIHAK lainnya atau otoritas pemerintah.
- (3) Masing-masing PIHAK harus segera memberitahukan kepada PIHAK lainnya jika menyadari atau memiliki kecurigaan adanya pelanggaran atas ketentuan Pasal ini.
- (4) Apabila salah satu PIHAK terbukti melanggar ketentuan Pasal ini, maka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan ditunda atau diakhiri dan PIHAK yang melanggar bertanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku serta

membebaskan PIHAK yang tidak melanggar dari bertanggung jawab atas ganti rugi apapun sebagai akibat dari tindakan ini.

Pasal 25

Monitoring dan Evaluasi

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Penutup

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.
- (2) Sejak tanggal berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini, seluruh perjanjian atau kesepakatan sebelumnya yang mengatur hal yang sama antara PARA PIHAK dinyatakan tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum.

PIHAK KEDUA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. Tetty Kurniawati, Sp.S.,M.Kes
Direktur

PIHAK PERTAMA
PT. JASA RAHARJA
CABANG MAGELANG



Nifar Siahaan, S.E
Kepala Cabang